

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan berkelanjutan karena mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara global, sektor pariwisata terus menunjukkan pemulihan pasca pandemi COVID-19. UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) atau Organisasi Pariwisata Dunia menegaskan bahwa pariwisata berkelanjutan harus mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pariwisata juga berperan penting dalam mendukung pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada tujuan terkait pertumbuhan ekonomi inklusif, pembangunan kota berkelanjutan, serta konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (UNWTO, 2023). Dengan demikian, pengembangan sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal.

Gambar 1.1 Sustainable Development Goals (SDGS)



Sumber: Website UNTAR (2025)

Salah satu tujuan bangsa Indonesia dalam mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum untuk mencapai tujuan nasional. Salah satu upaya pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan industri pariwisata (UNTAR, 2024). Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pengembangan pariwisata tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga untuk memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Presiden Jokowi menyatakan bahwa sektor pariwisata harus lebih tangguh dan menyejahterakan masyarakat (ANTARA, 2022). Berdasarkan hal tersebut menunjukkan optimisme yang begitu besar terhadap sektor pariwisata dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Pemerintah menyatakan bahwa pengembangan sektor pariwisata saat ini menjadi prioritas (ekon.go.id, 2024). Pemerintah menyerukan kepada segenap pemangku kepentingan pariwisata untuk secara bersama-sama berupaya bagaimana pengembangan sektor pariwisata mampu lebih tangguh dan menyejahterakan (Suadnyana, 2022).

Pengembangan sektor pariwisata Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pengembangan pariwisata memiliki pengaruh penting berbagai aspek. Pengembangan pariwisata dilakukan dengan memperhatikan karakteristik potensi yang dimiliki daerah. Indonesia memiliki berbagai macam potensi di sektor pariwisata dimana setiap daerah memiliki karakteristik potensi pariwisatanya masing-masing. Potensi pariwisata yang dimiliki daerah harus dikembangkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia yang memiliki daya tarik wisata beragam, mulai dari wisata sejarah di Kawasan Kota Lama hingga destinasi budaya dan permukiman tematik, yang semuanya memberikan kontribusi signifikan terhadap total jumlah kunjungan wisatawan ke kota ini. Sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang perekonomian di kota ini. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang menjadi salah satu destinasi

kunjungan wisatawan dengan beberapa daya tarik wisata, seperti: alam, religi, budaya, wisata buatan, minat khusus, dll. Potensi wisata di berbagai daerah Semarang berhasil menarik minat wisatawan untuk berkunjung sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan Kota Semarang pada sektor wisata setiap tahunnya. Berikut disajikan tabel yang menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Semarang dari tahun 2021-2023:

Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Semarang Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Wisatawan	
	Nusantara	Mancanegara
2021	2.663.684	77
2022	5.338.233	4.918
2023	6.478.883	13.992

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2023)

Berdasarkan data jumlah kunjungan wisatawan di atas, dapat diketahui adanya tren peningkatan kunjungan wisatawan yang signifikan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara, meskipun dengan laju pertumbuhan yang berbeda. Tren peningkatan ini menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah dan pengelola destinasi wisata untuk terus memperkuat kualitas layanan, infrastruktur, serta strategi pengembangan wisata agar mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara berkelanjutan.

Di antara berbagai destinasi wisata yang ada di Kota Semarang, Kampung Pelangi muncul sebagai salah satu pengembangan inovatif yang menarik perhatian publik dan pemerintah daerah, karena memanfaatkan konsep estetika visual dan partisipasi komunitas dalam penataan lingkungan permukiman menjadi objek wisata tematik yang unik (Putera, 2025). Secara historis, kawasan ini dibangun di atas permukiman yang sebelumnya kumuh dan kurang tertata, lalu dicat dengan warna-warna cerah sehingga menciptakan daya tarik visual yang kuat serta menjadi lokasi foto dan swafoto yang populer di media sosial. Kampung Pelangi tidak sekadar menjadi ikon estetika kota tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan

perekonomian masyarakat lokal melalui keterlibatan dalam aktivitas ekonomi kreatif seperti UMKM dan penyediaan layanan wisata.

Kampung Pelangi berada di kawasan permukiman padat penduduk yang sebelumnya identik dengan permasalahan lingkungan dan keterbatasan infrastruktur. Program pengembangan Kampung Pelangi diawali dengan transformasi visual melalui pengecatan rumah secara warna-warni. Menurut Tussyadiah & Miller (2020), daya tarik visual dapat menjadi pemicu awal minat wisatawan terhadap suatu destinasi. Hal tersebut terbukti ketika Kampung Pelangi sempat menjadi ikon wisata Kota Semarang dan menarik perhatian wisatawan. Daya Tarik Kampung Pelangi ini termasuk dalam kategori wisata buatan yang tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Daftar Daya Tarik Wisata Buatan di Kota Semarang

No.	Nama Daya Tarik Wisata	Alamat
1.	Kampung Batik	Jl. Batik Bubakan
2.	Kampoeng Semarang	JL. Kaligawe Km. 1 No.98
3.	Kampung Wisata Taman Lele	Jl. Raya Tugu Km. 10
4.	Kampung Alam Malon	Jl. Malon, Gunungpati
5.	Kampung Labu Jamalsari	Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Ngaliyan
6.	Kampung Laut	Jl. Komplek PRPP Maerokoco
7.	Kampung Pelangi	Jl. Dr. Sutomo No. 89 Randusari
8.	Kampung Safety Reading	Kelurahan Pandansari

Sumber: Website SiKenang Kota Semarang (2025)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kota Semarang memiliki beragam destinasi wisata buatan yang tersebar di berbagai wilayah dan dikembangkan dengan konsep tematik yang berbeda-beda. Keberagaman ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata berbasis kreativitas, budaya lokal, edukasi, serta rekreasi keluarga.

Sebaran lokasi daya tarik wisata buatan yang relatif merata di berbagai kecamatan menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Kota Semarang

dilakukan secara inklusif dan tidak terpusat di satu kawasan saja. Hal ini berpotensi mendorong pemerataan manfaat ekonomi pariwisata bagi masyarakat lokal di berbagai wilayah. Namun demikian, banyaknya destinasi wisata buatan juga menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya dalam hal daya saing, keberlanjutan pengelolaan, dan konsistensi kualitas masing-masing destinasi.

Hal yang mendasari pemilihan Kampung Pelangi, Kota Semarang sebagai objek penelitian dibandingkan dengan Kampung di kota lainnya, yakni ide awal revitalisasi berasal dari Pemerintah Kota Semarang, yang kemudian didukung oleh masyarakat. Hal ini berbeda dengan Kampung Pelangi lainnya yang muncul dari inisiatif masyarakat itu sendiri. Berikutnya, adanya peran aktif dari masyarakat dan Pokdarwis dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensi kampung pasca revitalisasi serta pengembangan infrastruktur seperti gardu pandang, area kuliner, dan perpustakaan dapat mendukung daya tarik wisata (Pramesti, 2024)..

Transformasi Kampung Gunung Brintik menjadi Kampung Pelangi dimulai pada tahun 2017 atas inisiatif seorang mantan Walikota Semarang, Bapak Hendrar Prihadi atau biasa disebut Pak Hendi yang ingin mempercantik wilayah tersebut. Dengan menggandeng pemerintah, swasta, serta partisipasi warga mereka melakukan pengecatan warna-warni pada lebih dari 200 rumah warga, memasang mural, memperbaiki infrastruktur jalan, serta penambahan fasilitas umum seperti toilet dan tempat sampah (Firdaus, 2020). Kampung ini pun viral di media sosial dan menarik wisatawan dari berbagai daerah.

Sebelum menjadi kampung wisata, kawasan ini identik dengan permukiman kumuh dan kurang tertata. Rumah-rumah berdampingan dengan dinding kusam, saluran air tidak mengalir dengan baik, serta tidak adanya ruang terbuka hijau, seperti pada gambar berikut ini:

Gambar 1.2 Foto Sebelum dan Sesudah Kampung Pelangi



Sumber: Website merahputih.com (2025)

Setelah pengembangan Kampung Pelangi, kawasan ini telah mengalami perubahan yang drastis melalui pengecatan rumah-rumah dengan warna cerah, pemasangan mural yang memiliki tema, pemasangan pot bunga gantung, serta perbaikan infrastruktur jalan kecil dan sistem drainase. Transformasi visual ini menarik perhatian luas dari masyarakat, wisatawan, dan media nasional maupun internasional. Kampung Pelangi menjadi viral di media sosial dan mendapat julukan “*kampung instagenic*”, karena tampilan warna-warni rumahnya yang sangat menarik untuk berfoto. Lebih dari sekadar perbaikan visual, program Kampung Pelangi juga membawa dampak sosial dan ekonomi. Warga setempat mulai membuka usaha kecil seperti warung, jasa foto, pemandu wisata, dan penjualan souvenir yang menandai adanya peningkatan aktivitas ekonomi berbasis komunitas.

Namun seiring berjalannya waktu, pengembangan Kampung Pelangi menghadapi sejumlah fenomena masalah dan mengancam dalam upaya keberlanjutan program ini. Pertama, meskipun cat warna-warni menjadi daya tarik visual pada awal pembentukannya, terdapat beberapa bagian permukaan bangunan yang mengalami pudarnya cat dan tidak diikuti dengan perawatan atau pengecatan

ulang secara berkala, sehingga mengurangi estetika visual kawasan seiring berjalannya waktu.

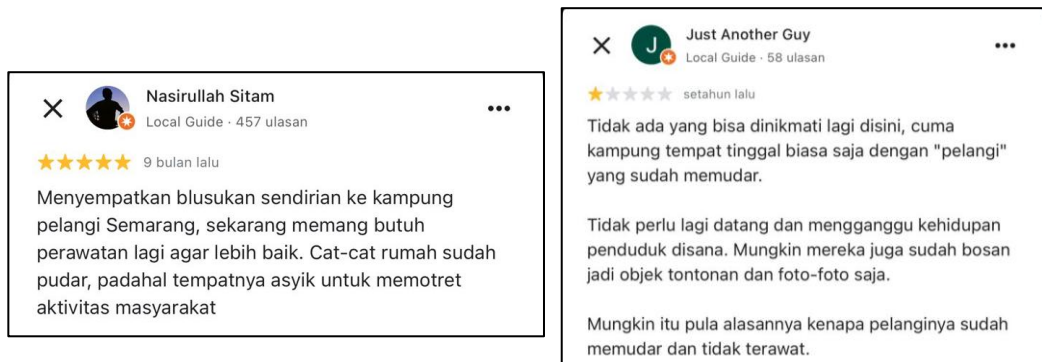
Gambar 1.3 Memudarnya cat pada permukaan bangunan



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Dari pernyataan di atas juga didukung berdasarkan ulasan yang disampaikan pengunjung pada Google Maps, menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada aspek fisik berupa memudarnya warna cat, tetapi juga pada aspek pengelolaan, keberlanjutan program, serta keseimbangan antara kepentingan pariwisata dan kenyamanan masyarakat sebagai penghuni kawasan. Dengan kata lain, pengelolaan kawasan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan wisatawan sekaligus menjaga kualitas hidup masyarakat lokal.

Gambar 1.4 Ulasan permasalahan di Google Maps



Sumber: Google Maps Kampung Pelangi (2025)

Kondisi tersebut berimplikasi pada menurunnya citra Kampung Pelangi sebagai destinasi wisata unggulan. Penurunan kualitas visual dan pengelolaan dapat memengaruhi persepsi publik, sehingga berpotensi menurunkan minat kunjungan wisatawan. Jika tidak segera diatasi melalui upaya perawatan berkelanjutan dan penguatan manajemen destinasi, maka keberlangsungan program pengembangan wisata Kampung Pelangi dapat terancam dan tidak lagi mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat setempat.

Berikutnya, terdapat penurunan kunjungan wisatawan yang signifikan jika dibandingkan dengan periode awal popularitasnya pada tahun 2017, padahal arus wisatawan merupakan faktor penentu keberlanjutan ekonomi lokal dan keberlangsungan destinasi wisata itu sendiri. Penurunan kunjungan wisatawan ini dibuktikan dari kutipan berita sebagai berikut:

Gambar 1.5 Penurunan kunjungan wisatawan



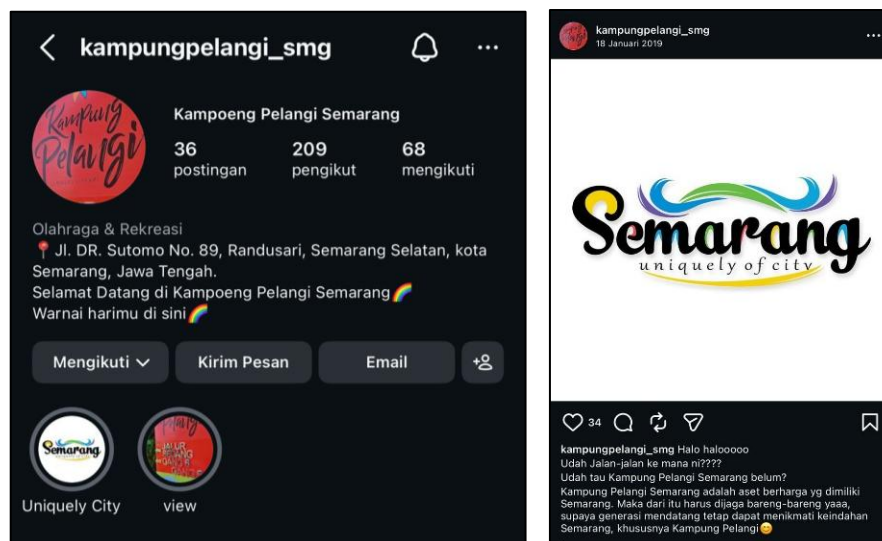
Sumber: Website regional.espos.id (2024)

Pada website tersebut dapat diketahui bahwa Kampung Pelangi mengalami penurunan signifikan sejak masa pandemi Covid-19 hingga periode pasca pandemi. Wisatawan yang datang cenderung terbatas, seperti rombongan studi tiru atau wisatawan asing dari kapal pesiar, dengan frekuensi yang tidak menentu. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik wisata yang sebelumnya belum mampu dipertahankan secara berkelanjutan. Dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, arus kunjungan wisatawan memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi lokal. Penurunan jumlah pengunjung berdampak langsung

pada berkurangnya pendapatan masyarakat dari sektor usaha wisata, seperti penjualan paket wisata, kuliner, maupun jasa lainnya.

Kemudian, branding dan promosi digital Kampung Pelangi melalui media sosial seperti Instagram belum dikelola secara optimal. Pihak pengelola Kampung Pelangi memang sudah memiliki akun sosial media sebagai sarana promosi, namun belum dimanfaatkan dengan baik. Padahal di era digital ini, media sosial memiliki peran yang penting dalam mempromosikan destinasi wisata dan menjangkau wisatawan yang lebih luas. Sehingga potensi pemasaran digital dinilai kurang maksimal dibandingkan destinasi wisata lain.

Gambar 1.6 Akun Instagram Kampung Pelangi yang tidak aktif lagi



Sumber: Instagram @kampungpelangi_smg (2025)

Hal ini terlihat dari minimnya aktivitas unggahan postingan pada akun Instagram Kampung Pelangi, sehingga membuat promosi yang dijalankan menjadi kurang baik. Dapat dilihat terakhir kali memposting foto pada 18 Januari 2019. Kurangnya pembaruan postingan dan strategi pemasaran yang kurang efektif menyebabkan potensi promosi Kampung Pelangi tidak termaksimalkan.

Selain promosi, permasalahan pengembangan wisata Kampung Pelangi terlihat pada sumber daya manusia yakni kelembagaan Pokdarwis belum berjalan secara optimal. Dilansir dari banyumas.tribunnews.com (2025), Ketua Pokdarwis Kampung Pelangi menyatakan bahwa pengurus pokdarwis tetap ada, tapi kita

lemah dari dalam. Karena teras teras Pokdarwis ini pekerja sosial. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Fitriani dan Wijaya (2023) yang menyatakan bahwa peran Pokdarwis di Kampung Pelangi cenderung tidak berjalan secara mandiri, melainkan hanya aktif ketika terdapat arahan dari pemerintah atau kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan masih terbatas, baik dari segi inisiatif, koordinasi internal, maupun keberlanjutan program. Dengan kata lain, Pokdarwis belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi sebagai motor penggerak wisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*). Unsur kesatuan masyarakat dibawah pokdarwis terbilang kurang, dikarenakan belum adanya regenerasi kepengurusan pokdarwis Kampung Pelangi. Lebih lanjut, kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan, seperti pelatihan dan pendampingan belum dilakukan secara berkelanjutan. Akibatnya, kemampuan anggota pokdarwis dalam hal manajemen organisasi, pemasaran wisata, serta pengelolaan program masih terbatas. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya kinerja organisasi dalam mengembangkan inovasi wisata dan menjaga daya tarik destinasi.

Permasalahan serupa mengenai sumber daya manusia ini juga terbukti pada partisipasi masyarakat yang cenderung bergantung pada adanya insentif atau imbalan yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya bersifat mandiri dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Aryaningtyas et al. (2021) yang menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Pelangi pada dasarnya memiliki persepsi positif terhadap pengembangan wisata karena memberikan manfaat ekonomi, namun dukungan tersebut tidak sepenuhnya stabil dan cenderung dipengaruhi oleh keuntungan yang dirasakan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat pragmatis, yaitu akan meningkat ketika ada manfaat ekonomi, namun berpotensi menurun ketika manfaat tersebut tidak dirasakan secara signifikan.

Selain itu, dilanjutkan oleh penelitian Fitriani dan Wijaya (2023) yang mengungkapkan bahwa dalam pengembangan Kampung Pelangi, masyarakat cenderung berperan sebagai pelaksana kegiatan dan belum sepenuhnya menjadi inisiator. Keterlibatan masyarakat lebih banyak terjadi ketika terdapat arahan dari pemerintah atau pihak kelurahan, sehingga menunjukkan bahwa tingkat kemandirian partisipasi masih terbatas. Kondisi ini memperkuat indikasi bahwa

partisipasi masyarakat belum sepenuhnya berbasis kesadaran internal, melainkan masih dipengaruhi oleh dorongan eksternal, termasuk insentif maupun arahan program. Meskipun masyarakat telah dilibatkan dalam berbagai aktivitas wisata dan usaha lokal, seperti produksi kerajinan dan pelayanan wisata, tingkat partisipasi tersebut masih dipengaruhi oleh faktor motivasi eksternal, khususnya insentif ekonomi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya didorong oleh kesadaran kolektif atau rasa memiliki terhadap program, melainkan masih bergantung pada keuntungan langsung yang diperoleh.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek terkait pengembangan wisata berbasis komunitas. Penelitian oleh (Pramesti, 2024) memfokuskan kajiannya pada aspek tata kelola (*governance*), khususnya mengenai siapa saja pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat dalam mendukung transformasi Kampung Pelangi dari kawasan permukiman menjadi destinasi wisata. Penelitian lain oleh (Ramadhani, 2023) mengkaji bagaimana kebijakan dan program pengembangan Kampung Pelangi dilaksanakan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan untuk melihat sejauh mana standar prosedur dan tujuan awal program dijalankan. Sementara itu, penelitian oleh (Azizah, 2023) mengkaji peran serta masyarakat dalam menjaga keberlangsungan destinasi wisata di tengah penurunan kunjungan akibat pandemi.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai Kampung Pelangi telah banyak dilakukan dari perspektif peran aktor, implementasi kebijakan, dan partisipasi masyarakat. Akan tetapi, masih terdapat celah penelitian (*research gap*), yaitu belum adanya kajian yang secara komprehensif mengevaluasi program pengembangan wisata Kampung Pelangi secara menyeluruh berdasarkan kerangka evaluasi program yang sistematis.

Berangkat dari permasalahan ini, penelitian ini penting untuk dilakukan. Secara akademik, penelitian ini akan memperkaya diskursus mengenai evaluasi program pariwisata berbasis masyarakat dengan mengaplikasikan model CIPP secara rinci dengan analisis mendalam, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan wisata Kampung Pelangi. Secara praktis, temuan penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan terukur bagi Dinas Pariwisata Kota Semarang dan

pengelola lokal (pokdarwis) mengenai prioritas pemeliharaan elemen visual, strategi *rebranding* digital yang efektif, serta penyusunan jadwal pemeliharaan berkala yang sistematis, sehingga Kampung Pelangi dapat kembali menjadi destinasi wisata yang unggul dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Program Pengembangan Wisata Kampung Pelangi di Kota Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program pengembangan wisata Kampung Pelangi di Kota Semarang. Adapun pertanyaan penelitian yang diangkat adalah “Bagaimana evaluasi program pengembangan wisata Kampung Pelangi di Kota Semarang”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penurunan kualitas fisik dan estetika kawasan yang ditandai dengan memudarnya cat pada bangunan serta belum adanya perawatan dan pemeliharaan secara berkala.
2. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan dibandingkan dengan periode awal pada popularitasnya.
3. Belum optimalnya strategi branding dan promosi digital, khususnya melalui media sosial seperti instagram.
4. Kelembagaan pokdarwis Kampung Pelangi belum berjalan secara optimal.
5. Partisipasi masyarakat yang cenderung bergantung pada adanya insentif atau imbalan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana evaluasi program pengembangan wisata Kampung Pelangi di Kota Semarang?

2. Apa faktor-faktor yang berkontribusi pada pengembangan wisata Kampung Pelangi di Kota Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji evaluasi program pengembangan wisata Kampung Pelangi di Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi pada pengembangan wisata Kampung Pelangi di Kota Semarang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak baik bagi peneliti, pemerintah, maupun seluruh masyarakat, baik secara teoritis maupun praktis.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan tentang teori evaluasi dan menjadi referensi pembelajaran bagi ilmu administrasi publik serta memiliki kegunaan teoritis sebagai bahan masukan bagi para peneliti kedepannya yang ingin melakukan penelitian dengan topik evaluasi program pengembangan wisata.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan akademik dan analisis dalam memahami, mengkaji, serta mengevaluasi suatu program kebijakan publik secara sistematis dan ilmiah. Adapun penelitian ini juga menjadi wadah bagi peneliti untuk mengaplikasikan teori dan konsep yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam praktik penelitian lapangan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam proses perbaikan maupun pengambilan keputusan pada program pengembangan wisata berbasis kampung tematik. Hasil evaluasi yang diperoleh dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pengembangan wisata, sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam kemajuan sektor pariwisata daerah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengembangan wisata Kampung Pelangi, sehingga masyarakat dapat memahami sejauh mana program tersebut memberikan manfaat, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat setempat dalam meningkatkan partisipasi, memperkuat pengelolaan wisata, serta mendorong keberlanjutan program agar tetap memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Tahun/Judul	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yasmin, A., N., Nurcahyanto, H., & Marom, A. (2024). Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Wisata Babakan di Jakarta. <i>Journal of Management & Public Policy</i> , 13(2), pp. 1-24.	Menganalisis hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan revitalisasi wisata budaya Setu Babakan di Jakarta Selatan dan konsep revitalisasi.	Penelitian ini menggunakan teori kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, meliputi: 1) Efektifitas 2) Efisiensi 3) Kecukupan 4) Perataan 5) Responsivitas 6) Ketepatan	Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini ditemukan bahwa implementasi kebijakan revitalisasi kawasan Desa Budaya Betawi Setu Babakan yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Wilayah berjalan dengan baik, namun hasil revitalisasi masih lambat perkembangannya, kecukupan fasilitas masih kurang, dan penyebaran informasi baik secara vertikal maupun horizontal masih kurang. Berdasarkan enam indikator tersebut, masih ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam formulasi

					implementasi kebijakan revitalisasi.
2.	Riangger, Subowo, A., & Herawati, A., R. (2024). Evaluasi Program Desa Wisata Candirejo Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. <i>Journal of Management & Public Policy</i> . 13(1), pp. 1-17.	Mengkaji dan menganalisis evaluasi program Desa Wisata Candirejo dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.	Penelitian ini menggunakan teori indikator evaluasi program menurut Kendall (1992), yakni sebagai berikut: 1) <i>Goal Achievement</i> (Pencapaian Sasaran) 2) <i>Measurement of Improvement</i> (Pengukuran Perbaikan) 3) <i>Measurement Result</i> (Pengukuran Hasil) 4) <i>Cost Efficiency</i> (Efisiensi Biaya) 5) <i>Organizational Change</i> (Perubahan Organisasi) 6) <i>Unplanned Effect</i> (Efek yang Tak Terencana)	Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ditemukan pada indikator <i>Hasil Pengukuran, Cost Efficiency, Organizational Change</i> , dan <i>Unplanned Effect</i> telah mampu memberikan pengaruh positif dan membawa perubahan situasi bagi sebagian masyarakat di Desa Candirejo. Sementara itu, indikator <i>Goal Achievement, Measurement of Improvement</i> , dan <i>Unarticulated Hopes</i> belum mampu mencapai seluruh tujuan program dan masih ada target program yang belum berpartisipasi.

			7) <i>Unarticulated Hopes</i> (Harapan yang Tak Terartikulasikan)		
3.	Salsabila, I., A., & Santoso, S., R. (2025). Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Desa Wisata Jatirejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , 14(2), pp. 667-683.	Mengevaluasi dan menganalisis implementasi program pengembangan desa wisata di Jatirejo.	Penelitian ini menggunakan teori kriteria evaluasi pelaksanaan program menurut Bridgman dan Davis dalam (Agustina, 2022), meliputi: 1) <i>Input</i> 2) <i>Process</i> 3) <i>Output</i> 4) <i>Outcome</i>	Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Implementasi desa wisata Jatirejo telah optimal dalam hal indikator <i>outcome</i> , tetapi masih kurang optimal dalam hal indikator <i>input</i> , <i>process</i> , dan <i>output</i> .
4.	Monika, T., & Prakoso, A., A. (2023). Evaluasi Pengembangan Desa Wisata, Studi Kasus pada Desa Wisata Pacarejo Gunungkidul. <i>Journal of Tourism and Economic</i> , 6(1), pp. 11-26.	Mengevaluasi kondisi Desa Wisata Pacarejo sehingga dapat menghasilkan strategi yang tepat dalam menentukan pedoman dan strategi pengembangan ke depan sebagai Desa Wisata	Penelitian ini menggunakan teori elemen desa wisata yang dikembangkan oleh Prakoso (2022), antara lain: 1) <i>Setting</i> 2) <i>Sumber Daya</i> 3) <i>Pengelolaan</i> 4) <i>Manfaat</i>	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Produk dan pemasaran menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi dan kelembagaan Desa Wisata Pacarejo, sehingga pemfokusan strategi yang telah dijabarkan dilakukan dengan tahap sebagai berikut: tahap I penguatan kebijakan, kelembagaan dan SDM; tahap

		Mandiri berbasis nilai-nilai kelokalan.			II pengemasan dan diversifikasi produk; tahap III promosi dan pemasaran; dan, tahap IV monitoring dan evaluasi.
5.	Srinandini, Basyar, M. R., & Hariyoko, Y. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekowisata Pada Daerah Pesisir Di Desa Kulati Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi. <i>PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik</i> , 4(6), pp. 29-42.	Mendeskripsikan evaluasi kebijakan pengembangan ekowisata pada daerah pesisir di Desa Kulati Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi.	Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn, meliputi: 1) Efektivitas 2) Efisiensi 3) Kecukupan 4) Pemerataan 5) Responsivitas 6) Ketepatan	Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif.	Kebijakan yang digunakan dalam pengembangan ekowisata di Desa Kulati telah memenuhi indikator-infidikator keberhasilan untuk mewujudkan pengembangan ekowisata di Desa Kulati untuk meningkatkan hasil yang lebih optimal bagi masyarakat dan lingkungan.
6.	Pradipto, S., R., A., & Try, H., A. (2021). Evaluasi Pengelolaan Objek Wisata Pasar Semarang Tinjomoyo sebagai Pasar Wisata di Kota Semarang. <i>Journal of Politic and</i>	Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Pasar Semarang Tinjomoyo sebagai Pasar Wisata di Kota Semarang.	Penelitian ini menggunakan teori evaluasi program CIPP yang digagas D. L. Stufflebeam, meliputi: 1) <i>Context</i> 2) <i>Input</i> 3) <i>Process</i>	Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Pasar dikelola dengan kurang baik. Terdapat beragam hambatan yang tidak segera diatasi, hambatan berasal dari faktor internal salah satunya sumber daya manusia dan faktor eksternal yaitu cuaca. Melihat aspek pengembangan

	<i>Government Studies</i> , 10(3), pp. 359-368.		4) <i>Product</i>		potensi wisata, belum semuanya terpenuhi seperti akses transportasi umum dan fasilitas pendukung. Mengenai kelanjutan Pasar Semarang, akan dilanjutkan kembali dan sedang dalam tahap pembahasan dengan penambahan aktivitas bagi pengunjung dan pelatihan para pedagang yang akan terlibat.
7.	Meylanda, A., A., & Purnaweni, H. (2025). Evaluasi Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja pada Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> .	Mengevaluasi program Pusat Informasi dan Konseling Remaja pada Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.	Penelitian ini menggunakan teori model evaluasi CIPP menurut D. L. Stufflebeam (2013), meliputi: 1) <i>Context</i> 2) <i>Input</i> 3) <i>Process</i> 4) <i>Product</i>	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Implementasi program PIK Remaja di Desa Kerjo Lor masih mengalami kendala pada sub-indikator, yaitu kebutuhan remaja, kendala pemerintah, kondisi sosial dan ekonomi, sumber daya untuk mengimplementasikan program PIK Remaja masih memiliki kapasitas sumber daya yang rendah, tingkat partisipasi dan pengelolaan

					kegiatan remaja masih rendah, dan masih terdapat kendala dalam manfaat yang diberikan kepada remaja terkait program PIK Remaja Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor.
8.	Amalia, Y., U., & Subowo, A. (2025). Evaluasi Pelaksanaan PKH untuk Menyejahterakan Masyarakat Miskin di Kelurahan Bintoro Demak. <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , 14(3), pp. 186-202.	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menyejahterakan masyarakat miskin di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.	Penelitian ini menggunakan teori model evaluasi menurut Bridgman dan Davis (2004), meliputi: 1) <i>Input</i> 2) <i>Process</i> 3) <i>Output</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	Pelaksanaan PKH di Kelurahan Bintoro telah memberikan dampak positif dalam menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala, seperti: keterbatasan Sumber daya manusia, keterlambatan pencairan bantuan, masalah teknis dalam penginputan data e-PKH, serta penyalahgunaan bantuan oleh sebagian

					Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
9.	Rimadevi, G., Mindarti, L., I., & Hanafi, I (2022). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Pantai Ngliyep Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang). <i>Jurnal Ilmiah Administrasi Publik</i> , 8(2), pp. 184-192.	Mengetahui hasil evaluasi kebijakan dari Program Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Malang tepatnya di Pantai Ngliyep, Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo Jawa Timur.	Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, meliputi: 1) Efektivitas 2) Efisiensi 3) Kecukupan 4) Pemerataan 5) Responsivitas 6) Ketepatan	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Pihak-pihak terkait berpartisipasi aktif dalam mengembangkan wilayah pesisir di Kabupaten Malang. Ketua Pengelola Pantai Ngliyep terus berusaha memaksimalkan promosi wisata melalui berbagai media. Dengan adanya Wisata Pantai Ngliyep sangat berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Desa Kedungsalam seperti menyediakan lapangan pekerjaan serta dapat melestarikan budaya dan tradisi masyarakat setempat.
10.	Pambudi, A., S., & Putri, D., M., A., C. (2022). Evaluasi Dukungan DAK Fisik Bidang Pariwisata	Menilai sejauh mana DAK Fisik mempengaruhi pembangunan bidang	Penelitian ini menggunakan analisis <i>big data</i> dan analisis kesenjangan dokumen	Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan	Ada keselarasan antara prioritas nasional terkait pariwisata dan kebutuhan daerah. Sentimen publik yang

	bagi Pembangunan Daerah: Studi Kasus Nasional dan Provinsi Jawa Timur. <i>Bappenas Working Papers</i> , 5(1), pp. 31-47.	pariwisata di daerah dan menganalisis permasalahan yang terjadi dari sudut pandang pemerintah daerah, media dan pemerintah pusat.	perencanaan pusat - daerah 2019.	pendekatan <i>mixed method</i> .	cenderung netral untuk bidang ini sehingga penguatan sektor pariwisata layak terus didorong dengan dana transfer khusus untuk mempercepat target-target pembangunan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
11.	Rahman, A. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu. <i>Journal of Tourism and Economic</i> 6(1), pp. 11-26.	Mengetahui efektifitas dalam implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu	Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, meliputi: 1) Efektivitas 2) Efisiensi 3) Kecukupan 4) Pemerataan 5) Responsivitas 6) Ketepatan	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) berperan dalam menyediakan modal usaha bagi masyarakat Kecamatan Kilo dan mampu memberdayakan masyarakat pesisir. Ukuran keberhasilan dari implementasi PEMP di Kecamatan Kilo apabila dilakukan sosialisasi dan implementasi yang <i>massive</i> , tidak hanya di Kecamatan Kilo, tetapi juga sampai ke desa-desa lainnya.

12.	Muslikhah, I., Herawati, A., R., & Purnaweni, H. (2025). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas melalui Batik Ciprat Karya Barokah di Desa Pucung Kabupaten Wonogiri. <i>Journal of Management and Public Policy</i> , 14(2), pp. 1154-1166.	Memberikan gambaran studi evaluasi dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi dalam program pemberdayaan masyarakat disabilitas melalui batik ciprat Karya Barokah.	Penelitian ini menggunakan teori model evaluasi illuminatif oleh Hanley, meliputi: 1) <i>Observasi</i> 2) Tahap <i>Inkuiri</i> 3) Tahap <i>Explanasi</i>	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.	Program pemberdayaan disabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang diamati dengan studi evaluasi dengan objek observasi, inkuiri dan eksplanasi masih ditemukan permasalahan, yang berupa masih minimnya pendamping, belum adanya dasar hukum, evaluasi yang dilakukan selama ini dalam lingkup kecil yaitu Pemerintah Desa saja, serta terdapat tiruan produk yang mengatasnamakan batik ciprat Karya Barokah.
-----	--	---	---	---	--

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu, persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang ada di atas terletak pada fokusnya, seluruh penelitian di atas dan penelitian penulis keduanya berfokus pada evaluasi program atau kebijakan. Teori yang digunakan pada penelitian terdahulu tentang evaluasi program mayoritas adalah teori evaluasi William Dunn, Bridgman dan Davis dan CIPP. Metode yang digunakan adalah dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, kuantitatif maupun mix metode. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian. Penelitian ini mengambil lokus di Kampung Pelangi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teori evaluasi yang dikemukakan oleh D. L Stufflebeam dengan 4 aspek yaitu *context*, *input*, *process*, dan *product*. Penulis juga melakukan analisis terkait faktor-faktor yang berkontribusi pada pengembangan wisata dengan aspek berupa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pembaharuan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus dan teori, belum ada peneliti terdahulu yang melakukan evaluasi program pada lokasi ini yaitu Kampung Pelangi dengan menggunakan teori D. L Stufflebeam.

Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa program pengembangan wisata dan sejenisnya memiliki potensi besar dalam pengembangan kawasan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor internal seperti pemahaman masyarakat, partisipasi, dukungan anggaran, dan konsistensi kebijakan, serta faktor eksternal seperti kondisi sosial-ekonomi dan kapasitas kelembagaan.

1.6.2 Administrasi Publik

Menurut Nicholas Henry (dalam Mulyadi, 2016;34), Administrasi publik merupakan suatu kombinasi yang kompleks antar teori dan praktik dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik juga berusaha untuk melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas dan efisiensi. Kemudian Herbert A. Simon 1993 (dalam Pasolong, 2007: 2) mengemukakan bahwa

administrasi yaitu kegiatan kelompok kerja sama agar terwujud tujuan kolektif. Kegiatan tersebut adalah pekerjaan yang terencana dan terstruktur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau sekelompok orang yang bekerja sama untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan atas dasar efektif, efisien dan rasional.

Adapun Chandler & Plano (dalam Pasolong, 2014:7) menjelaskan bahwa administrasi publik adalah langkah memberdayakan sumber daya manusia secara koordinatif dan terorganisir untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan melakukan pengelolaan terhadap suatu keputusan dalam kebijakan publik.

Berdasarkan uraian dari para ahli, maka dari penelitian dapat disimpulkan bahwa administrasi publik ialah ilmu yang memahami hubungan pemerintah dengan publik yang bertujuan meningkatkan responsibilitas kebijakan serta melembagakan praktik manajerial sehingga kegiatan-kegiatan dapat berjalan secara efektif, rasional dan efisien. Selain itu, dalam administrasi publik terdapat memberdayakan manusia secara koordinatif dan terorganisir dalam melakukan pengelolaan terhadap keputusan kebijakan publik. Di dalam administrasi publik juga terdapat ilmu manajemen dan organisasi guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh lembaga dan atau pemerintahan.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Dalam penelitian Marcellus, dkk (2017) terdapat penjelasan mengenai tahapan-tahapan perkembangan administrasi publik menurut Nicholas Henry (1975), dimana beliau membagi dalam bentuk 6 dimensi, yaitu:

- 1. Paradigma I: Dikotomi antara Politik dan Administrasi (1900-1926)** Paradigma 1 atau paradigma dikotomi politik dan administrasi yang dibawa oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White menekankan lokus daripada fokusnya. Lokus dari paradigma ini adalah *government bureaucracy*. Dalam buku tersebut menyatakan bahwa terdapat dua perbedaan fungsi pemerintah yaitu fungsi politik

dan fungsi administrasi. Dalam fungsi politik yaitu suatu tindakan yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan yang dimiliki negara. Sedangkan dalam fungsi administrasi, yaitu mencangkup pada peran eksekutif dalam menjalankan kebijakan. Telihat terdapat pemisahan kekuasaan dengan ditandai perbedaan fungsi kewenangan tersebut.

2. Paradigma II: Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma 2 atau paradigma prinsip-prinsip administrasi dibawa oleh Willoughby Gullick dan Urwick. Pada paradigma ini fokusnya lebih ditekankan daripada lokusnya. Hal ini karena pada paradigma ini menganggap bahwa lokus dapat dilakukan dimanapun termasuk di sektor pemerintahan.

3. Paradigma III: Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970) Dikenal dengan paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik, dimana administrasi publik mengalami krisis identitas dan ilmu politik sangat dominan dalam dunia administrasi publik (Keban, 2014: 33). Lokus dalam paradigma ini lebih diutamakan daripada fokus. Lokus dari paradigma ini adalah birokrasi pemerintahan.

4. Paradigma IV: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Paradigma ini dikenal dengan paradigma administrasi publik sebagai manajemen. Pada paradigma ini lokus menjadi tidak jelas dan lebih mementingkan fokus. Fokus lebih diperhatikan disini karena manajemen dapat diterapkan di dunia administrasi publik tidak hanya di dunia bisnis.

5. Paradigma V: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang) (*New Public Management*)

Paradigma 5 yaitu paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik. Paradigma ini telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik; sedangkan

lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik (Keban, 2014: 33).

6. Paradigma VI: *Governance* (1990-sekarang)

Paradigma *governance* merupakan suatu bentuk reformasi mengubah orientasi yang dilakukan sebelumnya yaitu menekankan arti penting kesetaraan antara institusi negara, swasta dan masyarakat dengan mendasarkan diri pada prinsip-prinsip *good governance*. Paradigma ini mengutamakan mekanisme dan proses dimana warga negara dapat mengartikulasikan kepentingannya, pemerintah diharapkan dapat memainkan perannya dalam menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sedangkan sektor swasta memainkan perannya menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan (Ikeanyibe et al., 2017: 11). Pada paradigma ini terdapat tiga isu penting yaitu *partnership*, *networking*, dan *collaboration*. Orientasi administrasi publik yang semua adalah kekuasaan kini menjadi pelayan negara.

Penelitian ini lebih mengarah pada paradigma *Governance*, yang menekankan peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya, penyelenggaraan fasilitas publik, dan pencapaian tujuan pemerataan yang adil. Dalam konteks ini, evaluasi program pengembangan wisata Kampung Pelangi di Kota Semarang mencerminkan upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Paradigma *Governance* menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam kebijakan publik, yang tercermin dalam penyelenggaraan program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penelitian ini akan menyoroti bagaimana Pemerintah Kota Semarang mengelola pengembangan wisata di Kampung Pelangi. Paradigma *Governance* bisa digunakan untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam program ini, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta implementasi. Mengingat, penelitian ini nantinya akan mengkaji

sejauh mana kebijakan yang diterapkan dalam program ini dapat secara efektif memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

1.6.4 Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah "kebijakan" atau "*policy*" berasal dari bahasa Yunani "*polis*" yang berarti negara atau kota. Istilah tersebut kemudian masuk ke dalam bahasa Latin sebagai "*politia*" yang berarti negara. Akhirnya, istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai "*policie*" yang memiliki arti terkait dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah "kebijakan" atau "*policy*" digunakan untuk mengacu pada perilaku seorang aktor, seperti pejabat, kelompok, atau badan pemerintah, atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Nuryanti Mustar, 2015).

Sementara itu, pengertian publik dalam konteks *Public Policy* memiliki tiga konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum. Hal ini dapat dilihat dari sudut pandang subjek, objek, dan lingkungan dalam kebijakan. Konsep kebijakan publik sendiri mengimplikasikan adanya suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan bersifat pribadi atau milik individu, melainkan merupakan milik bersama atau milik umum. Dalam konteks pencapaian tujuan kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik mudah dipahami karena mengacu pada "tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama." Selain itu, kebijakan publik juga mudah diukur karena ukurannya jelas, yaitu sejauh mana kemajuan dalam mencapai tujuan yang diharapkan telah tercapai (Nuryanti Mustar, 2015).

Laswell dan Kaplan mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan berbagai tujuan, nilai, dan praktik tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*). Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni: (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi

keadilan : *by the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjamin dan berkelanjutan (Nur & Guntur, 2019).

Adapun tahapan dalam proses pembuatan kebijakan menurut Dunn adalah sebagai berikut (Fatmariyanti et al., 2023):

1. Fase Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*) : para pejabat yang dipilih dan diangkat di sini menjadikan masalah kebijakan sebagai prioritas dalam agenda publik.
2. Fase Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*) : para pejabat menyusun berbagai opsi kebijakan sebagai solusi untuk mengatasi masalah.
3. Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*) : disini dilakukan seleksi dan penerimaan alternatif kebijakan dengan dukungan mayoritas dan/atau konsensus dari institusi terkait.
4. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*) : kebijakan yang telah diambil diimplementasikan oleh unit-unit administrasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, terutama dalam hal keuangan dan sumber daya manusia.
5. Penilaian Kebijakan (*Policy Assesment*) : unit-unit pemeriksaan dan akuntansi melakukan evaluasi terhadap kelayakan lembaga pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.

Benang merah dari definisi kebijakan publik, yakni harus sejalan dengan nilai-nilai masyarakat dan dinamika yang ada. Implementasi kebijakan publik penting untuk memastikan esensinya. Kebijakan tersebut harus mengkoordinasikan nilai-nilai dan praktik dalam masyarakat, sebagai rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kebijakan memberikan petunjuk dan batasan umum bagi pelaku dan pelaksana kebijakan, penting untuk pengolahan organisasi dan pengambilan keputusan. Kebijakan diharapkan menjadi alat pemecahan

masalah atas tindakan yang terjadi. Keberhasilan kebijakan publik tergantung pada implementasi dan manfaat positif bagi anggota masyarakat.

1.6.5 Evaluasi Program

Evaluasi merupakan mata rantai dari proses kebijakan publik. Evaluasi kebijakan menurut Mustopadidjaja (Yusri, 2020) didefinisikan sebagai kegiatan untuk melihat dan menilai kegagalan maupun keberhasilan suatu kebijakan publik. Evaluasi dilakukan dengan pemberian nilai atas kegiatan dengan kriteria penilaian yang sebelumnya telah ditetapkan. Pada dasarnya, evaluasi kebijakan publik bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil yang didapat dari diterapkannya suatu kebijakan dengan membandingkan antara target pencapaian kebijakan dan realita hasil yang diperoleh. James P Lester dan Joseph Stewart dalam (Haniyuhana & Katerina Bataha, 2022) menyatakan bahwa tujuan evaluasi kebijakan adalah melihat kemampuan kebijakan memberikan dampak yang diinginkan serta penyebab kegagalan suatu kebijakan. James dan Josep juga berpendapat bahwa tugas evaluasi kebijakan termasuk juga menentukan konsekuensi yang timbul dari adanya kebijakan, dengan cara menggambarkan penilaian dampak keberhasilan dan kegagalan dengan dasar berupa standar atau kriteria yang telah ditetapkan.

Evaluasi dianggap sebagai kegiatan fungsional dan dilakukan dalam setiap tahap kegiatan suatu kebijakan. Menurut Dunn dalam (Sabrina et al., 2023), terdapat beberapa karakteristik yang membedakan evaluasi kebijakan dengan metode analisis kebijakan lain seperti fokus nilai (evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai suatu kebijakan dan program), interdependensi fakta nilai (evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai), orientasi masa kini dan masa lampau (evaluasi bersifat bersifat retrospektif), dan dualitas nilai (nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara). Ketika melakukan suatu evaluasi kebijakan, terdapat beberapa informasi yang dihasilkan dan akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan lanjut tidaknya suatu kebijakan, antara lain

efisiensi, keuntungan, efektifitas, keadilan, detriments dan manfaat tambahan (Yusri, 2020).

Program merupakan bagian dari suatu kebijakan. Selain evaluasi kebijakan, salah satu jenis evaluasi yang sering dijalankan oleh peneliti adalah evaluasi program. Evaluasi program berarti suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keterlaksanaan program sebagai realisasi kebijakan, dengan tujuan mengetahui apakah program ini berjalan dengan rencana atau tidak. Definisi evaluasi program menurut Tyler adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sengaja menggunakan data-data yang sesuai fakta guna untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program yang dijalankan maupun program yang telah berlalu (Bahri et al., 2022).

Secara singkat evaluasi program berarti proses yang dilakukan untuk mengetahui suatu keberhasilan realisasi sebuah program. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto dalam (Wartiningsih, 2021) evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui bagaimana suatu program dilaksanakan secara cermat sehingga efektivitas masing-masing komponen dalam program bisa terlihat. Ketika suatu program dievaluasi, maka evaluator perlu memahami besar mutu dan kondisi hasil pelaksanaan program, kemudian hasil tersebut akan dibandingkan dengan standar kualifikasi tingkat ketercapaian program yang ada sehingga diperoleh kesimpulan berupa keputusan yang sesuai (Lailatul Mufidah, 2021). Definisi lain evaluasi program juga disampaikan oleh Sukardi, dikatakan bahwa evaluasi program adalah proses pengumpulan dan analisis data secara komprehensif guna mengambil sebuah keputusan penting terkait program yang dinilai (Lailatul Mufidah, 2021). Dalam mengevaluasi program, banyak model yang bisa digunakan, namun keseluruhan model tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan topik evaluasi sehingga bisa digunakan sebagai dasar pengambil keputusan terkait keberlanjutan program.

Menurut Sukmadinata yang dikutip oleh Rusdi Ananda (dalam Vitrian, 2021) tujuan evaluasi program sebagai berikut:

- a. Membantu perencanaan dan memberi masukan dalam pelaksanaan program. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengelola program yang dijalankan dan memperbaharui perencanaan berdasarkan hasil tindak lanjut dari program sebelumnya.
- b. Membantu dalam perubahan program. Hasil evaluasi dapat membantu pengelola program untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaannya dan melakukan perbaikan untuk memperbaiki program untuk mencapai keberhasilan yang ditargetkan.
- c. Menemukan informasi tentang kelebihan dan kekurangan program. Dengan menggunakan evaluasi, pengelola dapat dengan mudah menemukan solusi untuk masalah.
- d. Menentukan keberlangsungan program. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai referensi untuk keberlangsungan program dengan mempertimbangkan dan memperbarui sehingga dapat dilihat apakah program ini dapat dilanjutkan atau dihentikan.
- e. Meningkatkan pemahaman mengenai proses psikologis, sosial, dan politik yang terlibat dalam pelaksanaan program serta komponen yang mempengaruhi program.

1.6.6 Model Evaluasi Program

CIPP Evaluation Model merupakan metode yang banyak digunakan oleh para evaluator dalam melakukan evaluasi. Menurut D. L. Stufflebeam (2013) model yang digunakan untuk mengevaluasi program yaitu Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, and Product*). Tujuannya adalah untuk menilai dan mengembangkan manfaat program, menyediakan informasi yang bertujuan untuk memperoleh keputusan alternatif, dan mengembangkan kebijakan program. Model Evaluasi CIPP meliputi:

- 1) **Evaluasi *Context***. Evaluasi konteks berkaitan dengan penyediaan informasi supaya dapat mencapai tujuan. Informasi yang diperoleh mengidentifikasi terkait dengan kebutuhan, masalah, peluang, dan kondisi yang terjadi dalam lingkungan program. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keputusan supaya dapat memperbaiki

program dan membantu merumuskan “*goal and objectives*”. Selain itu, evaluasi konteks bertujuan untuk merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan apa yang akan dicapai oleh sebuah program, dan merumuskan tujuan program (Tayibnapi, 2013). Tujuan utama evaluasi konteks yaitu mengevaluasi seluruh situasi yang ada di sebuah organisasi, mengetahui dan memahami semua kelemahan yang ada, dan mencari solusi untuk mengatasi masalah di organisasi.

- 2) **Evaluasi *Input***. Evaluasi input menilai pendekatan alternatif, rencana aksi yang bersaing, rencana kepegawaian, dan anggaran untuk kelayakan dan potensi efektivitas biaya dalam memenuhi kebutuhan yang ditargetkan dan mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Evaluasi *input* menjadi sebuah evaluasi yang dapat menyediakan informasi terkait masukan yang telah terpilih, kelebihan dan kelemahan, strategi, dan desain untuk merealisasikan tujuan (Sukardi dalam Setiyaningrum, 2016). Tujuannya adalah untuk membantu para pengambil keputusan agar terhindar dari inovasi yang sia-sia atau ada kemungkinan terjadi kegagalan. Komponen utama dalam evaluasi *input* mencakup sumber daya manusia, sarana dan peralatan, dana atau anggaran, serta berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.
- 3) **Evaluasi *Process***. Evaluasi proses merupakan evaluasi yang berupaya dalam pemantauan kembali pelaksanaan program, peninjauan kembali rencana organisasi, serta evaluasi yang telah dilakukan. Evaluasi proses berfungsi untuk mengidentifikasi atau mengantisipasi rancangan prosedur atau implementasi yang akan terjadi selama tahap pelaksanaan. Selain itu, evaluasi ini juga memberikan data yang digunakan dalam pengambilan keputusan terkait program dan berfungsi sebagai catatan atau dokumen tentang prosedur yang telah dilaksanakan (Setiyaningrum, 2016). Tujuan utama evaluasi proses menurut Mutrofin (dalam Setiyaningrum, 2016) yaitu:

- Untuk menghindari konsekuensi program yang tidak diinginkan.
 - Untuk memberikan informasi yang berkelanjutan mengenai kinerja program, seperti tingkat pelaksanaan, kesesuaian dengan tujuan awal, dan isu-isu terkait bagaimana program akan diterima atau diadopsi.
 - Untuk mendokumentasikan segala hal yang terjadi dalam proyeknya. Fungsi utama dari evaluasi proses yaitu untuk memberikan arahan dan masukan kepada staf organisasi supaya dapat melaksanakan programnya sesuai dengan rencana atau dapat melakukan modifikasi rencana yang ternyata hasilnya buruk.
- 4) **Evaluasi *Product***. Evaluasi produk merupakan evaluasi akhir dari suatu program yang berkaitan dengan identifikasi terhadap keluaran maupun manfaat dari program atau proyek, baik hasil yang direncanakan maupun tidak direncanakan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Evaluasi produk bertujuan untuk mendukung proses pengambilan keputusan selanjutnya terkait dengan hasil yang telah dicapai, maupun tindakan yang akan diambil setelah program berjalan. Evaluasi produk berfokus pada perubahan yang terjadi pada *input* awal (Farida Yusuf Tayibnaxis dalam Setiyaningrum, 2016). Penilaian mengenai keberhasilan program atau organisasi ini dikumpulkan dari individu atau kelompok yang terlibat, dan kemudian dianalisis. Dengan kata lain, evaluasi tersebut menganalisis keberhasilan atau kegagalan program dari berbagai perspektif.

1.6.7 Pengembangan Pariwisata

Pengembangan adalah strategi yang dilakukan guna untuk meningkatkan, memperbaiki, dan memajukan daya tarik wisata agar jumlah wisatawan mengalami peningkatan sehingga masyarakat dan pemerintah dapat merasakan dampak positifnya (Paturusi, 2001). Menurut Yoeti (2001

dalam Suwarti dan Yuliamir (2017) menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan mengembangkan suatu produk atau menambah jenis produk wisata tersebut.

Menurut Suwarti dan Yuliamir (2017), menjelaskan bahwa dalam pengembangan pariwisata itu terdapat 3 unsur penting yang dibutuhkan, yaitu:

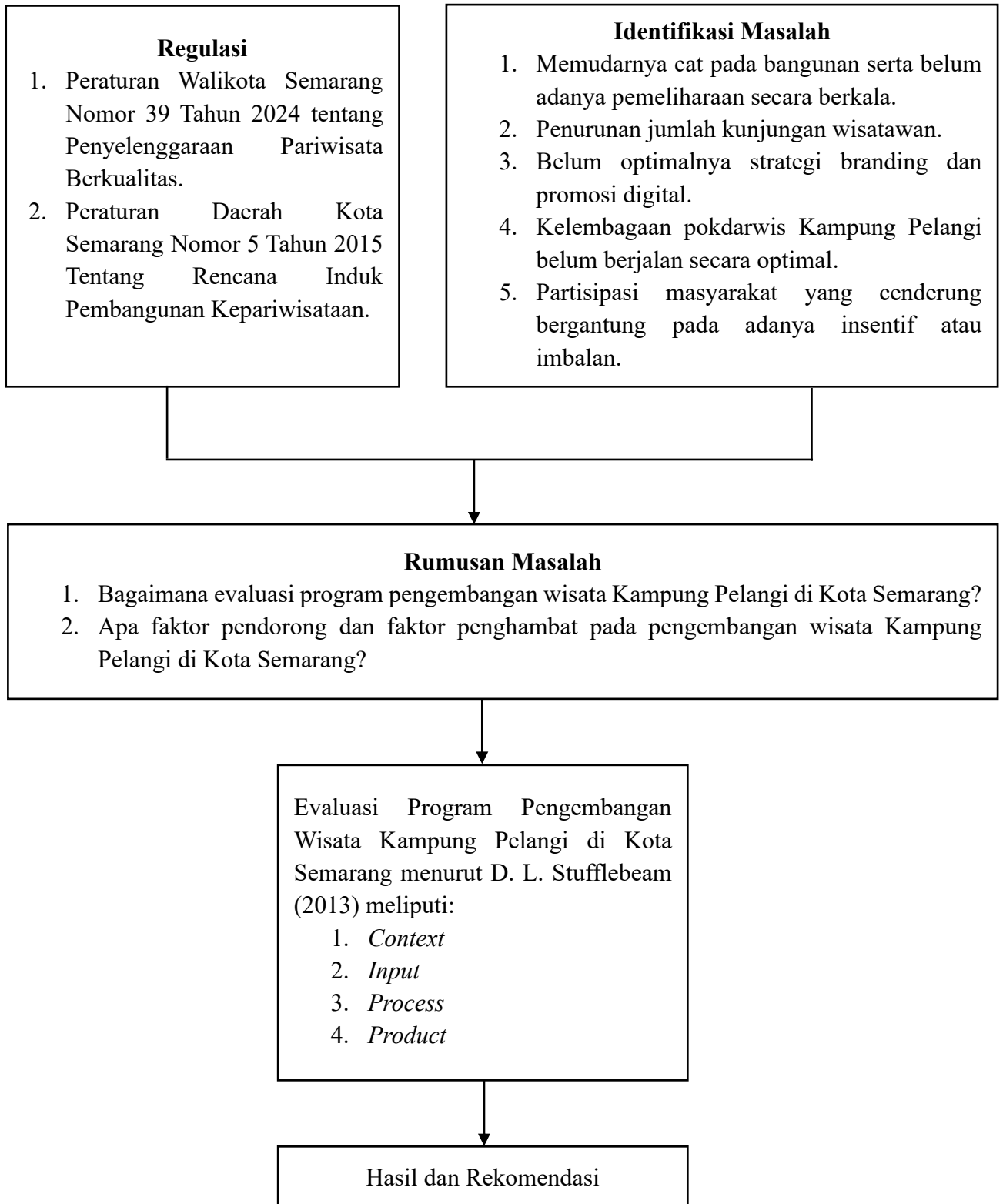
1. Manusia, adalah sebagai subjek yang utama dalam melaksanakan segala kegiatan pariwisata.
2. Tempat, adalah unsur fisik yang menjadi wadah dari segala kegiatan pariwisata.
3. Waktu, adalah berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan seorang wisatawan dalam perjalanan ke tempat wisata tersebut.

Menurut Yoeti (2006), dalam pengembangan sebuah pariwisata itu terdapat 4 prinsip dasar yaitu sebagai berikut:

1. Keberlangsungan ekologi artinya suatu pengembangan dalam pariwisata dapat menjamin pemeliharaan terhadap wisata tersebut.
2. Keberlangsungan kehidupan dan budaya artinya dengan adanya pengembangan pariwisata membuat peningkatan peran masyarakat dalam kehidupan dan budaya sehari-hari.
3. Keberlangsungan ekonomi artinya suatu pengembangan pariwisata yang menjamin keberlangsungan kegiatan ekonomi.
4. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat artinya memberi wadah kepada mereka untuk mengembangkan pariwisata di daerah tersebut.

Pengembangan suatu pariwisata sangat diperlukannya sebuah perencanaan. Hal ini bertujuan agar pengembangan yang sedang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana di awal dan dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Alasan utama dilakukannya sebuah pengembangan pariwisata ini untuk meningkatkan perekonomian daerah atau negara tersebut (Santi, 2010).

1.7 Kerangka Berpikir Penelitian



1.8 Operasionalisasi Konsep

Tahap operasionalisasi konsep dalam penelitian adalah proses mengubah konsep abstrak menjadi indikator-indikator yang lebih konkret dan terukur. Langkah ini mempermudah proses analisis data yang diperoleh. Keberhasilan kerangka operasional diukur berdasarkan sejauh mana dimensi yang dirumuskan mampu merepresentasikan fenomena yang diteliti secara jelas dan akurat. Operasionalisasi konsep yang dirancang dalam penelitian ini selaras dengan judul utama yang diangkat, yaitu "Evaluasi Program Pengembangan Wisata Kampung Pelangi di Kota Semarang", yang akan dievaluasi melalui dimensi-dimensi pelaksanaan kebijakan publik.

Tabel 1.8
Operasionalisasi Konsep

No.	Fenomena Penelitian	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati
1.	Evaluasi Program Pengembangan Wisata Kampung Pelangi di Kota Semarang	<i>Context</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi yang melatarbelakangi 2. Kondisi sosial ekonomi 3. Tujuan program 4. Kebutuhan masyarakat
		<i>Input</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia 2. Anggaran 3. Sarana dan prasarana
		<i>Process</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan program 2. Koordinasi dan komunikasi antar <i>stakeholder</i> 3. Kendala yang muncul 4. Monitoring dan evaluasi
		<i>Product</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paket wisata 2. Dampak kepada masyarakat 3. Rencana keberlanjutan program

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan aspek evaluasi di atas, pengembangan wisata Kampung Pelangi di Kota Semarang dapat dilihat dari faktor-faktor yang saling berhubungan satu sama lain yaitu:

1. Sumber Daya
2. Dukungan Pemerintah
3. Partisipasi Masyarakat
4. Komunikasi
5. Struktur Organisasi

1.9 Argumen Penelitian

Penelitian dengan fokus evaluasi dilakukan untuk mengambil keputusan dengan menganalisis data serta informasi tentang topik terkait yang kemudian akan dibandingkan dengan kriteria, standar atau tolak ukur yang digunakan sebagai pembanding dengan data yang diperoleh (Rahmi Pertiwi et al., 2023). Hakekatnya, evaluasi ini adalah proses sistematis yang sifatnya berkelanjutan dengan tujuan menentukan nilai dan arti dari sesuatu yang didasarkan pada pertimbangan melalui kriteria tertentu dalam rangka membuat suatu keputusan. Dalam sektor publik, evaluasi menjadi salah satu elemen terpenting jika dikaitkan dengan kebijakan atau program, Evaluasi perlu dilakukan dalam setiap program atau kebijakan yang diambil pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat (Elsa Monika & Nur Laila Meilani, 2023). Adanya evaluasi memungkinkan pemerintah mengambil keputusan tentang keberlanjutan program dengan melihat dampak program bagi masyarakat dan keberhasilan program untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Penelitian mengenai Evaluasi Program Pengembangan Wisata Kampung Pelangi ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan dan manfaat yang diharapkan dari adanya program berhasil dirasakan oleh masyarakat Kampung Pelangi serta untuk mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi pada pengembangan wisata. Oleh karena itu, peneliti mengambil dua rumusan masalah yaitu bagaimana evaluasi program pengembangan wisata Kampung Pelangi dan apa faktor-faktor yang berkontribusi pada pengembangan wisata Kampung Pelangi. Peneliti berargumen bahwa program ini masih belum maksimal, hal ini dibuktikan

dengan masih adanya permasalahan yang ditemui dalam pengembangan wisata, yakni: memudarnya cat pada bangunan serta belum adanya pemeliharaan secara berkala, penurunan jumlah kunjungan wisatawan, belum optimalnya strategi branding dan promosi digital, kelembagaan pokdarwis Kampung Pelangi belum berjalan secara optimal, dan partisipasi masyarakat yang cenderung bergantung pada adanya insentif atau imbalan.

Untuk mengevaluasi program pengembangan wisata Kampung Pelangi peneliti menggunakan teori evaluasi oleh D. L. Stufflebeam (2013) dengan memerhatikan indikator yang meliputi *context, input, process*, dan *product*. Urgensi dan nilai penelitian ini terletak pada hasil dimana hasil yang diperoleh nanti akan menyatakan tentang pengembangan wisata Kampung Pelangi secara umum terkait dengan pelaksanaan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Riset ini penting dilakukan mengingat evaluasi adalah tahapan terpenting untuk mengukur efektif tidaknya suatu program sehingga bisa diambil keputusan mengenai keberlanjutan program di masa mendatang.

1.10 Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau langkah, sedangkan *logos* berarti pengetahuan. Dalam konteks ilmiah, metode mengacu pada cara untuk memahami suatu objek studi, sementara metodologi merupakan ilmu yang menjadi pengetahuan berbagai metode kerja.

Adapun menurut Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data yang disesuaikan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ada empat elemen penting yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Selain itu, metode penelitian juga digunakan untuk menganalisis secara teoritis mengenai sebuah metode.

Penelitian sendiri adalah proses sistematis yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara objektif guna menyelesaikan masalah atau menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip umum. Metodologi penelitian merujuk pada pendekatan ilmiah yang terstruktur dalam pengumpulan

dan analisis data untuk memperoleh wawasan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

1.10.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Purba et al., 2021) penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang status terakhir subjek penelitian, yang merupakan metode penelitian faktual tentang status sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, sistem pemikiran atau peristiwa dalam saat ini. dengan interpretasi yang benar. Menurut Suharsimi Arikunto dalam (Hamdan Ridwan, 2023) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam mengelola data, pendekatan kualitatif tidak menggunakan pengelolaan statistik. Pendekatan kualitatif didasarkan pada fakta keadaan di lapangan dan teori yang relevan tentang keadaan tersebut. Output data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah uraian tertulis dari subjek terkait topik yang diamati.

Penelitian ini tergolong tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena menganalisis, mengobservasi, mempelajari serta mendeskripsikan tentang topik yang diteliti yaitu evaluasi program pengembangan wisata Kampung Pelangi. Penulis menafsirkan data yang didapat melalui pernyataan narasumber sehingga menemukan jawaban permasalahan tentang evaluasi program pengembangan wisata ini. Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini akan memberikan gambaran pengembangan wisata Kampung Pelangi, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan serta dampak adanya program yang dirasakan oleh masyarakat. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, data yang diperoleh penulis akan dituangkan dalam bentuk uraian naratif tentang situasi dan kondisi topik penelitian.

1.10.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Dalam sebuah penelitian, pasti memiliki tempat (*locus*) yang dijadikan sebagai objek penelitian. Menurut Al Muchtar (2015), lokus merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan dan terdapat fenomena yang dijelaskan dalam sebuah penelitian. Pemilihan lokasi penelitian harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti menariknya lokasi, keunikannya, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Pada penelitian ini lokus penelitian dilaksanakan di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang khususnya di Kampung Pelangi yang dapat memberikan informasi terkait bagaimana keadaan yang ada disana. Pemilihan lokasi ini dengan mempertimbangkan beberapa lokasi, sehingga menciptakan keefektifan waktu serta memberi kemudahan pada saat proses pengumpulan data.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan atau seseorang yang bisa memberikan informasi kepada seorang peneliti terkait situasi dan kondisi yang berhubungan dengan topik penelitian (Abduh et al., 2021). Informasi yang diberikan oleh subjek penelitian ini akan menjadi dasar dalam menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dan menentukan hasil penelitian. Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan subjek penelitian adalah *purposive sampling* agar bisa memperoleh informasi yang rinci dari subjek penelitian yang relevan, sehingga peneliti bisa memperoleh data yang tepat.

Teknik *purposive sampling* menurut Arikunto dalam (Amin et al., 2023) adalah suatu teknik pengambilan data yang sifatnya tidak acak, melainkan didasarkan pada pertimbangan tertentu untuk memperoleh target. Menurut Sugiyono dalam (Saat & Mania, 2020) *purposive sampling* berarti teknik yang dipakai untuk menentukan sampel penelitian dengan suatu pertimbangan, sampel diambil berdasarkan pertimbangan kriteria tertentu

yang telah ditentukan oleh peneliti. Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu:

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, merupakan lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dan berwenang mengatur segala urusan tentang wisata di Kota Semarang dan memastikan kebijakan-kebijakan terkait pengembangan wisata diimplementasikan dengan baik.
2. Lurah Randusari, merupakan kepala pemerintahan tertinggi di tingkat desa, sehingga memiliki otoritas dan tanggung jawab langsung dalam pengembangan wisata serta menjadi penghubung antara pemerintah kota dan masyarakat setempat.
3. Ketua Pokdarwis Kampung Pelangi, merupakan pengelola inti Kampung Pelangi dan bertanggung jawab penuh dalam menjalankan program yang dijalankan.
4. Ketua RW 3 Kampung Pelangi, merupakan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh warga setempat.
5. Pelaku Usaha Bunga Kertas, merupakan representasi pelaku UMKM pada sektor kerajinan tangan yang ada kaitannya dengan paket wisata di Kampung Pelangi.
6. Pelaku Usaha Wingko Babat, merupakan representasi pelaku UMKM pada sektor kuliner yang ada kaitannya dengan paket wisata di Kampung Pelangi.

1.10.4 Jenis Data

Menurut Sujarweni (2015), data dalam penelitian terbagi menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif secara sederhana dapat berupa kata atau kalimat yang memiliki makna tertentu, sementara data kuantitatif berbentuk angka yang dapat diukur. Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang terdiri dari berbagai teks, dokumen, foto, atau informasi yang disampaikan oleh informan. Data ini digunakan untuk menjelaskan dan mengetahui evaluasi program pengembangan wisata di Kampung Pelangi. Maka, dalam penelitian ini akan menggunakan data-data

yang bersumber dari penjelasan langsung oleh informan, pengamatan tindakan informan, hasil observasi lingkungan, serta dokumentasi sebagai penunjang data. Penelitian ini kemudian akan menghasilkan data deskriptif dari perolehan data-data di lapangan.

1.10.5 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengkaji fenomena secara mendalam. Data atau informasi yang disajikan didominasi oleh tulisan atau sekumpulan kata yang menggambarkan fenomena serta memberikan informasi yang mendalam. Data tersebut diinterpretasikan untuk memahami konteks yang lebih luas dan pola yang mungkin tidak terlihat dalam data kuantitatif. Selain narasi, data ini juga dipadukan dengan tabel dan grafik untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif serta mendukung analisis yang dilakukan. Menurut Sugiyono (2015:62), sumber data dalam penelitian diklasifikasikan menjadi 2 kategori utama, yaitu:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono dalam (Susianti, 2022) data primer adalah sumber data penelitian yang langsung memberikan informasi data kepada peneliti tanpa melalui perantara. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kata-kata, tindakan dan aktivitas dari para informan, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Lurah Randusari, Ketua Pokdarwis Kampung Pelangi, Ketua RW 3 Kampung Pelangi, Pelaku Usaha Bunga Kertas dan Pelaku Usaha Wingko Babat yang diamati dan diwawancari secara mendalam serta dilakukan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber yang tersedia tanpa interaksi langsung dengan subjek penelitian. Data ini dikumpulkan oleh pihak lain dan digunakan oleh peneliti untuk mendukung dan memperkuat analisis. Dalam penelitian ini, data

sekunder diambil dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen, berita, internet, serta data resmi dari lembaga pemerintah dan organisasi terkait. Sumber data sekunder mencakup publikasi BPS Kota Semarang, data/website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, website Pemerintah Kota Semarang. Selain itu, diperoleh juga melalui media sosial, seperti Instagram @kampungpelangi_smg, @disbudparkotasemarang, dan @kelurahanrandusari.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi langkah penting karena mendapatkan data merupakan tujuan utama dalam penelitian (Pahleviannur, et al., 2022). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Susan Stainback dalam (Pahleviannur, et al., 2022) mengungkapkan bahwa melalui wawancara akan diketahui hal-hal yang terperinci mengenai informan dalam menjelaskan situasi dan fenomena yang tidak dapat ditemukan melalui observasi. Wawancara sendiri merupakan dialog antara dua orang dalam rangka bertukar informasi terkait topik tertentu melalui tanya jawab (Esterberg dalam Pahleviannur, et al., 2022). Dalam hal ini, dilakukan wawancara secara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan mempersiapkan instrumen pertanyaan terlebih dahulu, kemudian para informan dapat memberikan pendapatnya secara lebih bebas dan terbuka dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara secara mendalam dilaksanakan dengan menyajikan beberapa pertanyaan kepada informan, yaitu pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Lurah Randusari, Ketua Pokdarwis Kampung Pelangi, Ketua RW 3 Kampung Pelangi, Pelaku Usaha Bunga Kertas dan Pelaku Usaha Wingko Babat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Peneliti mencatat jawaban yang diperoleh dan juga menggunakan alat bantu perekam suara.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian (Ardiansyah et al., 2023). Observasi dilakukan dengan melihat situasi nyata di lingkungan yang dirancang untuk penelitian. Observasi ini memberi kesempatan kepada peneliti untuk mengamati interaksi sosial, perilaku dan konteks yang relevan dengan fenomena yang diteliti (Bogdan & Biklen, 2017). Pada penelitian ini, penulis melakukan observasi dengan mendatangi langsung Kampung Pelangi untuk mengetahui kondisi langsung objek penelitian, baik mengenai permasalahan pengelolaan, sarana prasana maupun dampak wisata bagi masyarakat sekitar.

c. Dokumentasi

Pada teknik pengumpulan data, dokumentasi berkaitan dengan benda tertulis seperti dokumen, peraturan, buku, majalah, catatan, notulen, dll yang berkaitan dengan topik penelitian (Sonia Sischa Eka Putr, Novita Sari, 2024). Peneliti mengambil dokumentasi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan program baik dari media sosial maupun portal berita yang kemudian dikumpulkan untuk diolah menjadi deskripsi data yang mudah dipahami dan dibaca. Penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data dokumentasi melalui terjun lapangan di lingkungan Kampung Pelangi dan organisasi pelaksana program wisata. Peneliti juga mengumpulkan data dokumentasi dari portal berita dan media sosial yang relevan dengan topik yang diteliti. Berita yang ada seringkali membahas mengenai program wisata Kampung Pelangi sehingga bisa digunakan menjadi data penelitian.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Moleong (2017), analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka

penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dimana setelah data yang terkumpul tersebut diolah kemudian dianalisa dengan memberikan penafsiran berupa uraian di atas. Adapun kegiatan dalam analisa data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2013, hlm. 246), bahwa analisis data kualitatif terdiri dari 3 tahapan kegiatan, yakni sebagai berikut:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan data temuan lainnya. Kondensasi bertujuan untuk membuat data penelitian menjadi lebih kuat. Kondensasi data terjadi secara terus menerus selama kegiatan penelitian dilakukan. Kondensasi data juga dapat diartikan sebagai bentuk analisis data yang bertujuan untuk mempertajam, memilah, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa hingga didapatkan kesimpulan. Kondensasi data dapat dilakukan melalui kegiatan penulisan ringkasan, pengkodean, pengembangan tema, pembuatan kategori, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk memilah data atau informasi yang tidak relevan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data ini akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan hasil penyajian data tersebut. Menurut Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2013, hlm. 249), yang paling sering digunakan adalah teks naratif. Pada penelitian ini, peneliti akan menyajikan data hasil reduksi berupa narasi atau uraian singkat disertai gambar, tabel, ataupun data lainnya yang menjadi data pendukung agar dapat lebih mudah dipahami. Adanya penyajian data ini dapat membantu peneliti

dalam mengevaluasi program pengembangan wisata Kampung Pelangi serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan wisata guna memberikan rekomendasi yang tepat dan berdampak.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menurut Huberman (dalam Sugiyono, 2013, hlm. 252), langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Terdapat dua kesimpulan dalam penelitian kualitatif, yaitu dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah yang masih bersifat sementara akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya (Sugiyono, 2013, hlm. 252-253). Pada penelitian ini, peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui reduksi data dan penyajian data mengenai evaluasi program pengembangan wisata Kampung Pelangi. Setelah itu, melakukan verifikasi data dari beberapa temuan dan akhirnya menarik kesimpulan akhir, dimana dalam kesimpulan ini berisi analisis permasalahan yang lebih spesifik mengenai topik evaluasi program dengan menghubungkannya pada indikator teori yang digunakan.

1.10.8 Kualitas Data

Dalam melakukan suatu penelitian harus membuktikan bahwa data informasi yang dipakai benar-benar tepat dan konsisten. Maka dari itu, diperlukannya uji kredibilitas data untuk memeriksa kualitas data yang diperoleh. Pada penelitian ini, menggunakan metode triangulasi untuk memperoleh kredibilitas. Menurut Satori & Komariah, 2014:170, triangulasi adalah pengecekan data yang diperoleh melalui berbagai sumber, cara, dan waktu agar mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan sesungguhnya. Beberapa cara untuk melakukan triangulasi menurut (Wijaya (2018:120-121) meliputi:

1. Triangulasi Sumber, untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.
2. Triangulasi Teknik, untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.
3. Triangulasi Waktu, untuk menguji kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.

Penelitian menggunakan model ini karena dalam mendapatkan data dengan mengecek dari berbagai sumber yang kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan pandangan mana yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut. Dimana data yang telah di analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang akurat dan tepat.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data. Hal ini dikarenakan triangulasi sumber berarti memperoleh data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Peneliti melakukan pengumpulan berbagai sumber data dengan hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya dengan narasumber mengenai evaluasi program pengembangan wisata Kampung Pelangi.